

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Sepanjang Bulan Januari hingga Maret 2023 Inflasi Kabupaten Bandung bergerak linear dengan nilai inflasi Kota Bandung yang mengalami kenaikan tingkat inflasi ke-2 tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 0,74% pada Desember 2022 yang berdampak terhadap inflasi di awal Tahun 2023 dari Bulan Januari s/d Bulan Maret secara berurutan sebesar 7,37%, 7,5% dan 5,0%. Inflasi selama 3 bulan yang dialami oleh Bandung raya ini memiliki nilai tersebut lebih tinggi dari nilai inflasi yang ditargetkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang menginstruksikan agar nilai inflasi Kabupaten dan Kota berada dalam rentang 2% hingga 4%. Tingkat inflasi tersebut diakibatkan oleh naiknya *administer price* berupa Tarif Dasar Air PDAM Kota Bandung yang menyumbang kepada inflasi sebesar 0,3479%. Hal tersebut mendapatkan perhatian serius dari Menteri Dalam Negeri RI agar Pemerintah Daerah dapat mengendalikan tingkat inflasi terutama dalam hal ini tingkat harga yang diatur oleh Pemerintah Daerah, yaitu Tarif Dasar PDAM.

Komoditas penyumbang inflasi utama terbesar Kabupaten Bandung di Triwulan I yaitu:

1. Cabai merah
2. Tarif air minum PDAM
3. Kenaikan tarif cukai sebesar
4. Beras
5. Cabai rawit
6. Minyak goreng
7. Rokok kretek filter
8. Bawang merah
9. Cabai rawit

Adapun *volatile goods* yang menyumbang inflasi selama Triwulan I 2024 ini adalah beras, tomat, air kemasan, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, telur ayam ras, bawang merah.

Yang menjadi tantangan pada 3 bulan ini disebabkan oleh dua hal, diantaranya:

1. Imported inflation

Kenaikan harga batu bara dunia, kenaikan harga WTI dunia, kenaikan gas alam dan pupuk global, kenaikan harga emas & baja, kenaikan harga CPO dunia, juga kenaikan harga biji-bijian dunia seperti gandum, kedelai dan jagung

1. Cost Push

Kenaikan penyesuaian tarif air PDAM, kebijakan cukai rokok, penyesuaian tol listrik dan gangguan cuaca.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Mengingat nilai konsumsi Kabupaten Bandung berada di posisi ke-2 terbesar di Provinsi Jawa Barat, satu posisi setelah Kota Bekasi ditambah dengan jumlah populasi terbesar ke-2, maka

dalam upaya pengendalian inflasi Kabupaten Bandung diperlukan upaya yang ekstra dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Bandung agar ketersediaan pasokan pangan terpenuhi sehingga tidak terjadi kelangkaan yang akan memicu kenaikan inflasi terutama untuk 12 komoditas kebutuhan pokok. Menanggulangi hal tersebut upaya yang perlu dilaksanakan oleh Pemkab Bandung adalah membuat Lumbung Pangan Masyarakat, meningkatkan CPP Pemerintah, memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk *shock absorber* terhadap dampak inflasi yang ditujukan kepada masyarakat miskin ekstrim terdampak inflasi, serta kelancaran distribusi pangan dan koordinasi intens antara Tim TPID Kabupaten Bandung, TPID Provinsi Jawa Barat, ataupun dengan TPIN serta menjaga agar tarif dasar air PDAM tidak menimbulkan inflasi.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kabupaten Bandung senantiasa berupaya menjaga agar inflasi Kabupaten Bandung tetap stabil pada target rentang inflasi antara 2% hingga 4% sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2023. Target tersebut diupayakan melalui upaya Pemda untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran Bahan Pokok (*volatile good*) yang menjadi penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi Kabupaten Bandung dengan strategi 4 K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strategi tersebut dituangkan kedalam program kerja TPID Kabupaten Bandung diantaranya:

#### Strategi 4K Pengendalian Inflasi

##### Keterjangkauan Harga

#### Program Kerja

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebagai Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat dpasar Kabupaten/Kota
2. Gelar pangan murah sebagai program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten Kota sebagai program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
4. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (BLT)

Ketersediaan Pasokan

1. Melaksanakan Gelar Pangan Murah sebagai program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dengan kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

2. Fasilitasi Lumbung pangan masyarakat melalui kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai dewanengn daerah Kabupaten/Kota

3. Melaksanakan fasilitasi budidaya bawang merah

4. Melaksanakan fasilitasi budi daya cabai merah

5. Melaksanakan fasilitasi budidaya kentang

Kelancaran Distribusi

1. Melaksanakan survei penghitungan arus lalin dengan pemilihan angkutan barang

2. Pelaksanakan pembinaan angkutan barang umum

Komunikasi Efektif

1. Melaksanakan koordinasi intens antara Tim TPID Kabupaten Bandung, TPID Provinsi Jawa Barat, ataupun dengan TPIN melalui rapat koordinasi, capacity building maupun konsultasi.

2. Monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan sebagai program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Melaksanakan Monitoring harga-harga kebutuhan dan evaluasi secara langsung maupun melalui aplikasi yang datanya di isi oleh unomerator yang berada di tiap tiap pasar yg berada di wilayah kabupaten Bandung. Data yang di peroleh dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan.
- Telah dilaksanakan Gelar Pangan Murah.
- Telah melaksanakan monitoring evaluasi harga dan ketersediaan stok pangan.
- Telah melaksanakan fasilitasi benih padi dan bawang merah.
- Telah melaksanakan monev sibapokting di tingkat kabupaten bandung.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitasnya di rentang 2% hingga 4% menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri di Tahun 2023, Tim TPID Kabupaten Bandung dapat mengimplementasikan beberapa strategi:

1. **Pemantauan Pasar:** Tim TPID harus terus memantau kondisi pasar secara cermat, khususnya terkait dengan kenaikan permintaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Dengan pemantauan yang cermat, mereka dapat mengantisipasi perubahan-perubahan harga yang signifikan.

**Stok Cadangan:** Membangun stok cadangan bahan pokok yang cukup di daerah tersebut sebelum memasuki periode peningkatan permintaan dapat membantu mengurangi fluktuasi harga. Hal ini memungkinkan untuk menghadapi lonjakan permintaan tanpa harus mengandalkan impor yang mungkin mengalami keterlambatan atau hambatan lainnya.

3. **Edukasi Publik bekerja sama dengan pemuka agama:** Melakukan kampanye edukasi oleh Utzad kepada masyarakat agar tidak berlebihan dalam berbelanja barang ataupun jasa mengingat bulan ini adalah momen keagamaan yang tepat dalam HBKN Idul Fitri.